



RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

<http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

SIAPKAH SEKOLAH UNTUK DIBUKA KEMBALI?

Setelah sekitar empat bulan sekolah ditutup dan sebagian besar siswa belajar dari rumah akibat merebaknya COVID-19, pada 15 Juni 2020 pemerintah mengumumkan kebijakan pembukaan kembali sekolah di zona hijau pada tahun ajaran baru 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran yang berisi prosedur pembukaan kembali sekolah. Pada 7 Agustus 2020, mempertimbangkan berbagai kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh, Keputusan Bersama tersebut diperluas dengan membolehkan pembelajaran tatap muka di zona kuning.

Selama pandemi, Bank Dunia (2020) memperkirakan 90% siswa di dunia belajar dari rumah dan sebagian dari mereka tidak mendapat layanan pendidikan yang memadai. Di Indonesia, sejak Maret 2020 sebagian besar siswa (97%) belajar dari rumah, sementara sebagian lainnya tidak melakukan pembelajaran sama sekali (Puslitjak, 2020). Pelaksanaan belajar dari rumah menimbulkan berbagai masalah, seperti tidak meratanya akses internet, perangkat digital, serta rendahnya literasi digital guru menyebabkan pembelajaran tidak optimal (Puslitjak, 2020). Akibatnya, siswa mengalami penurunan kemampuan belajar (*learning loss*), kehilangan kebiasaan belajar, melebarnya kesenjangan siswa dari kalangan ekonomi lemah, potensi putus sekolah, serta risiko menurunnya kesejahteraan di masa depan (SMERU, 2020; Puslitjak, 2020; *The Economist* Jul 18th 2020; Bank Dunia, Agustus 2020). Kondisi ini mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan pembukaan kembali sekolah.

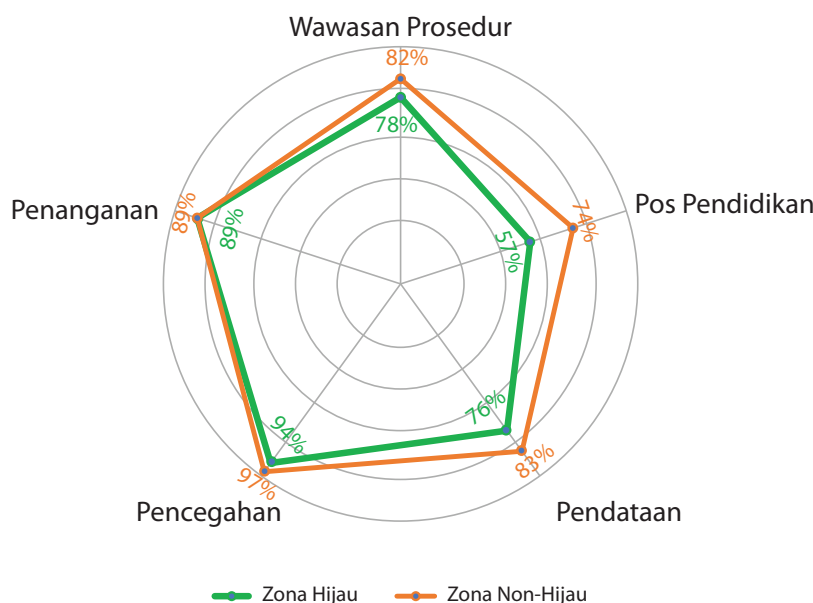
Namun, seberapa siap para pemangku kepentingan menerapkan pembukaan kembali sekolah? Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud melaksanakan survei guna mengetahui kesiapan dinas pendidikan, sekolah, guru, dan orang tua siswa di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Terdapat beberapa aspek yang dikaji, yaitu: wawasan mengenai prosedur pembelajaran tatap muka; pendataan warga sekolah; pencegahan dan penanganan COVID-19; kondisi kerentanan guru dan siswa; kesiapan sarana kesehatan dan kebersihan; serta kebiasaan melakukan protokol kesehatan.

Survei dilakukan secara daring antara 6 sampai 15 Juli 2020 melalui aplikasi SIM-PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan). Sampel diperoleh berdasarkan partisipasi dengan mempertimbangkan proporsi zona hijau dan non-hijau dengan jumlah sebagai berikut: 158 kepala dinas atau sekretaris dinas pendidikan kab/kota, 5.527 kepala sekolah, 77.746 guru, dan 11.054 orang tua. Hasil survei kemudian didiskusikan dengan sejumlah guru, kepala sekolah, pejabat dinas pendidikan, dan para pakar dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mendapat tanggapan, pengayaan, serta rekomendasi lebih lanjut.

KESIAPAN DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan merupakan pihak yang bertanggung jawab memastikan kesiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka yang aman. Oleh sebab itu, survei ini menanyakan lima aspek penting, antara lain: (1) wawasan mengenai prosedur pelaksanaan pembelajaran tatap muka; (2) keberadaan Pos Pendidikan sebagai sekretariat penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan; (3) pendataan kondisi warga sekolah; (4) kebijakan pencegahan dengan memastikan sekolah memiliki sarana kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan; serta (5) kebijakan penanganan bagi warga sekolah yang memiliki gejala atau potensi penularan.

Aspek Kesiapan Dinas Pendidikan Kab/Kota

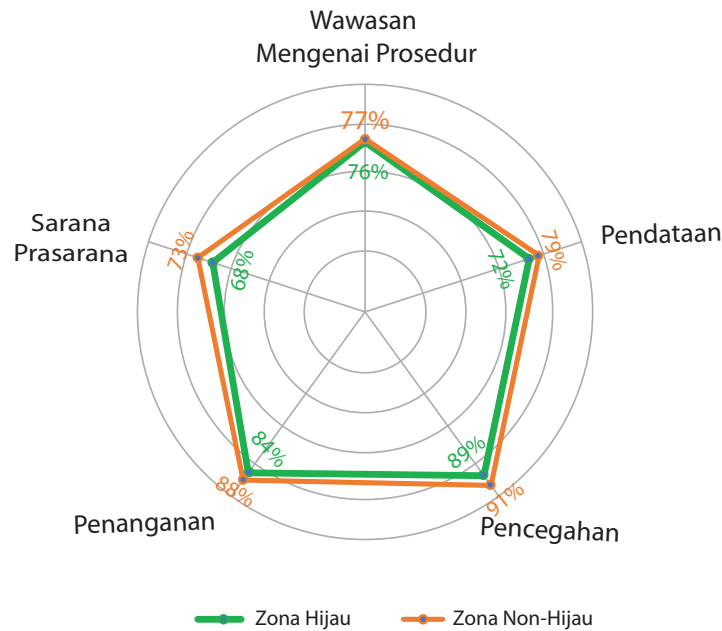


Dari kelima aspek tersebut, kesiapan Dinas Pendidikan dalam aspek pencegahan, penanganan, dan wawasan tentang prosedur belajar tatap muka sudah cukup baik. Dua aspek lainnya, yakni pendataan dan keberadaan Pos Pendidikan masih perlu ditingkatkan. Pada kedua aspek ini, terdapat perbedaan mencolok antara zona hijau dan non-hijau, di mana Dinas Pendidikan di zona non-hijau relatif lebih baik dibandingkan zona hijau. Zona hijau yang diperbolehkan membuka sekolah justru belum maksimal dalam melakukan pendataan dan pendirian Pos Pendidikan. Hal itu terkait dengan kondisi sebagian zona hijau yang tidak terdampak COVID-19, sehingga merasa tidak perlu mendirikan Pos Pendidikan. Dari diskusi kelompok terpumpun terungkap, keberadaan Pos Pendidikan belum diketahui luas oleh *stakeholder* pendidikan seperti guru dan kepala sekolah. Mereka berpendapat, pendirian Pos Pendidikan sangat diperlukan untuk koordinasi dan melakukan strategi penanganan COVID-19 di sektor pendidikan.

KESIAPAN SEKOLAH

Kesiapan sekolah dilihat melalui lima aspek, antara lain: (1) wawasan mengenai prosedur pembelajaran tatap muka; (2) pendataan kondisi warga sekolah; (3) pencegahan melalui penyediaan sarana kebersihan dan penerapan protokol kesehatan; (4); penanganan jika warga sekolah memiliki gejala atau potensi penularan; serta (5) kondisi sarana kebersihan dan kesehatan.

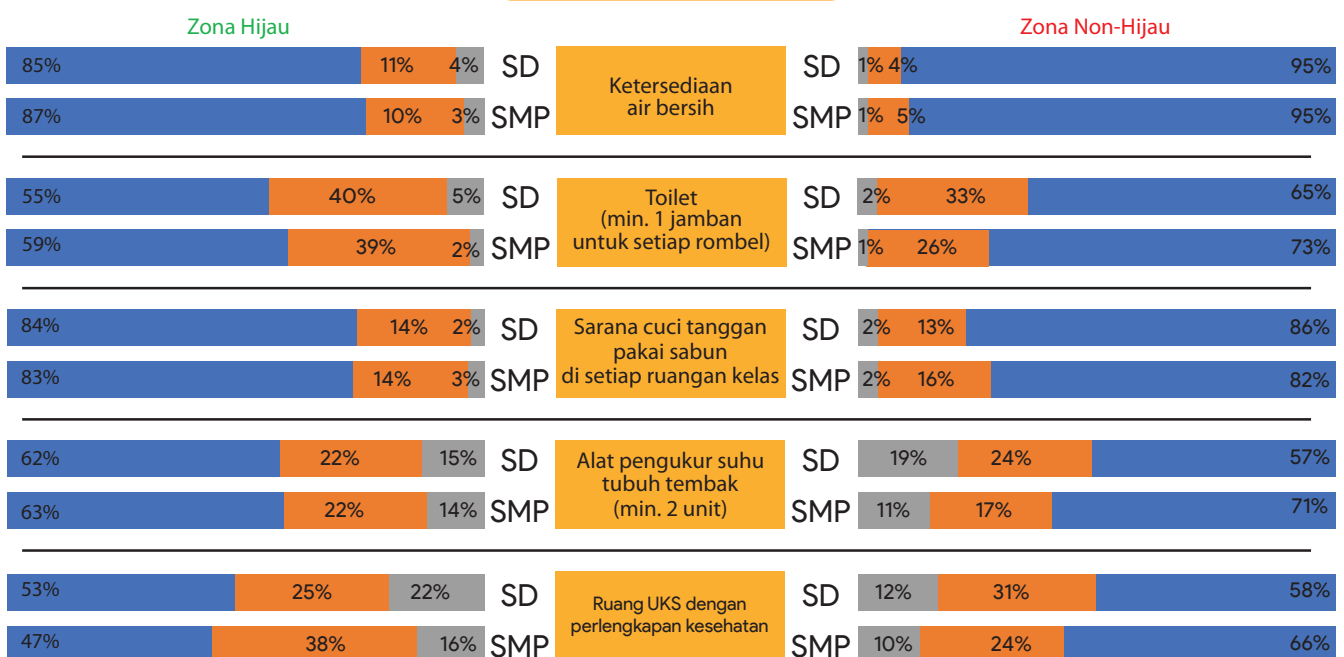
Aspek Kesiapan Sekolah



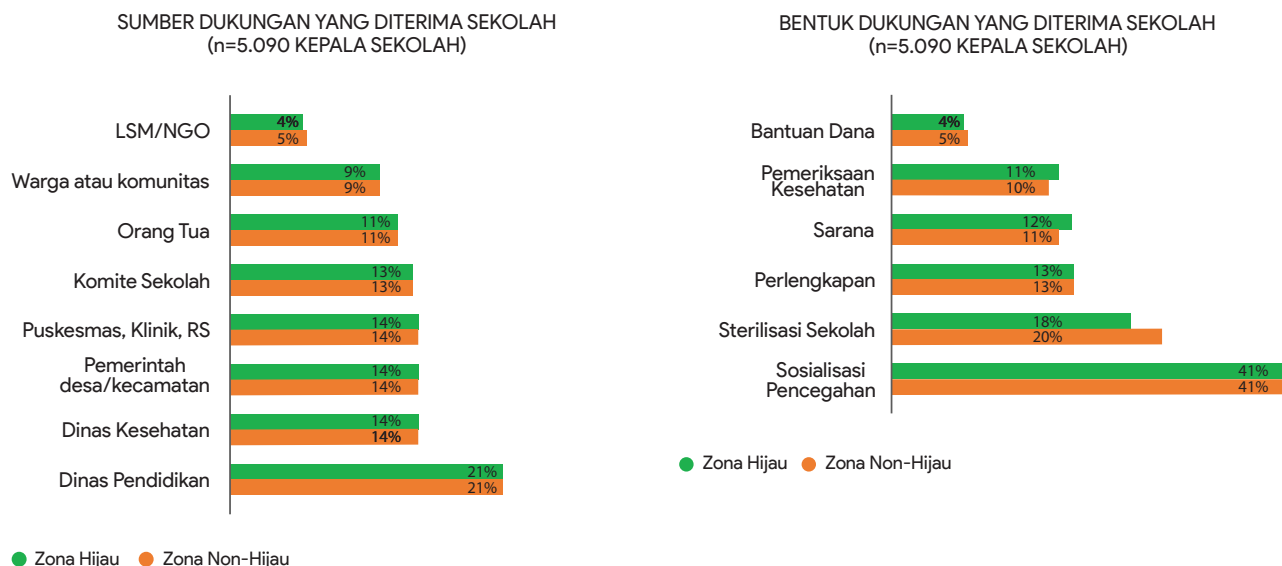
Dari kelima aspek tersebut, aspek pencegahan dan penanganan relatif baik. Tiga aspek lainnya masih perlu ditingkatkan, yaitu wawasan tentang prosedur belajar tatap muka, pendataan kondisi warga sekolah, serta kondisi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana perlu mendapat perhatian serius mengingat upaya pencegahan sangat bergantung pada kecukupan air, tempat cuci tangan pakai sabun, toilet, desinfektan, dan alat pengukur suhu tubuh.

Permendiknas 24/2007 sebetulnya telah mengatur bahwa setiap sekolah seharusnya memiliki ruang UKS yang dilengkapi termometer, toilet dengan ketentuan 1 jamban untuk setiap 60 murid laki-laki dan 1 jamban untuk setiap 50 murid perempuan, serta tempat cuci tangan sebagai kelengkapan di masing-masing ruang kelas. Namun, hasil survei ini menunjukkan, sebagian sekolah masih kurang atau belum memiliki berbagai sarana dan prasarana tersebut. Untuk itu, dua aspek penting dari sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan adalah fasilitas sanitasi yang memadai dan UKS yang lengkap guna mendukung kesehatan dan pencegahan COVID-19.

Jenis Sarana dan Prasarana

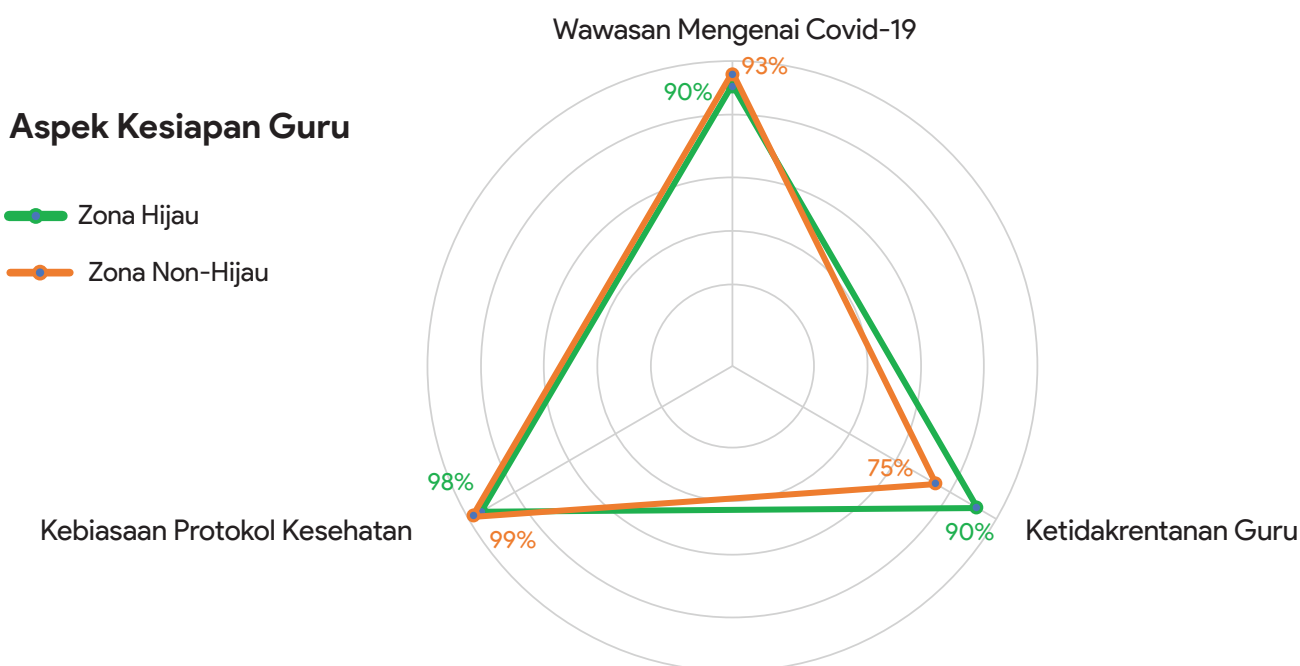


Berkenaan dengan upaya pencegahan COVID-19, sebagian besar sekolah telah menerima dukungan baik dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, pemerintah desa/kecamatan, Puskesmas, lembaga nirlaba, serta orang tua dan komite sekolah. Dukungan itu sebagian besar berupa sosialisasi pencegahan, namun untuk dukungan sterilisasi sekolah, perlengkapan, sarana, pemeriksaan kesehatan, hingga bantuan dana masih relatif kecil.



KESIAPAN GURU

Guru merupakan aktor penting dalam pembelajaran yang akan sering berinteraksi dengan siswa. Untuk itu, kami melihat tiga aspek penting guna mengetahui kesiapan guru, antara lain: (1) wawasan guru mengenai gejala, penularan, dan pencegahan COVID-19; (2) kerentanan guru terhadap COVID-19, misalnya riwayat interaksi dengan pasien positif, memiliki komorbiditas, serta akses ke sekolah melalui zona non-hijau; dan (3) kebiasaan melakukan protokol kesehatan, seperti cuci tangan, menggunakan masker, menerapkan etika batuk-bersin, menghindari kerumunan, dan jaga jarak fisik.

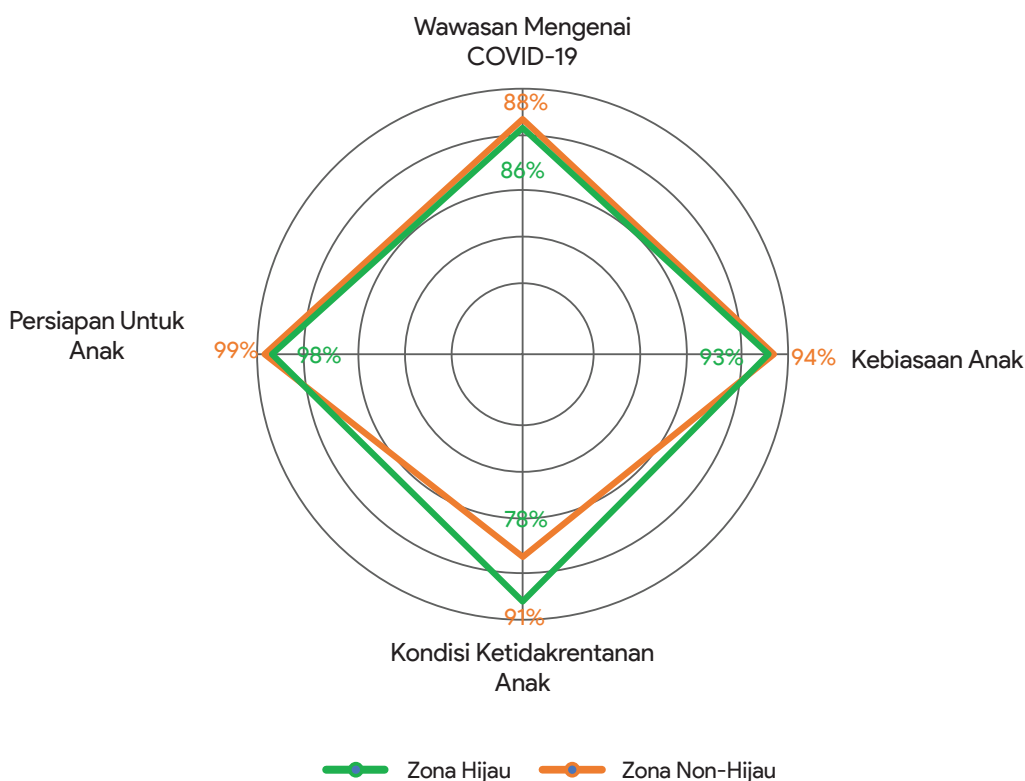


Dari ketiga aspek tersebut, aspek kebiasaan dan wawasan relatif baik. Hampir semua guru menyatakan telah menerapkan protokol kesehatan. Begitu pula dari segi wawasan, sebagian besar guru SD dan SMP telah paham mengenai gejala, penularan, dan pencegahan COVID-19. Namun, untuk aspek kerentanan, terdapat perbedaan signifikan antara zona hijau dan non-hijau, di mana guru di zona non-hijau memiliki kerentanan lebih tinggi. Di zona non-hijau, hanya sedikit guru (di bawah 6%) yang mengaku pernah berinteraksi dengan pasien positif dan memiliki penyakit penyerta (komorbiditas), namun mereka cukup rentan karena tinggal di wilayah zona non-hijau. Terkait dengan isu kerentanan ini, guru dan kepala sekolah dalam diskusi terpumpun menekankan perlunya tes kesehatan sebelum sekolah dibuka, terutama bagi guru dan tenaga kependidikan, untuk memastikan warga sekolah dalam keadaan sehat.

KESIAPAN ORANG TUA

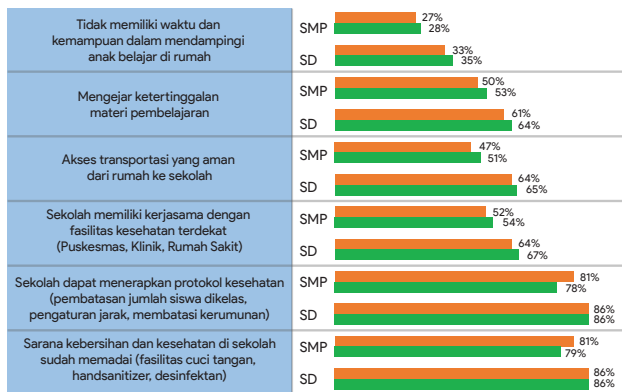
Peran orang tua dalam memastikan kesiapan anak untuk kembali ke sekolah sangat penting. Dalam survei ini kesiapan orang tua dilihat melalui empat aspek, yaitu: (1) wawasan orang tua mengenai COVID-19; (2) kebiasaan anak dalam melakukan protokol kesehatan; (3) kerentanan anak terhadap COVID-19; dan (4) persiapan orang tua bagi anaknya jika pembelajaran tatap muka dimulai, meliputi penyediaan masker, perlengkapan kebersihan, bekal makan-minum, dan pengetahuan pencegahan.

Aspek Kesiapan Orang Tua dan Anak



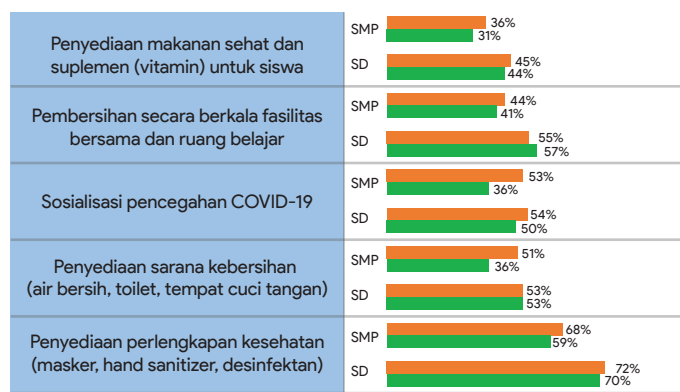
Dari keempat aspek tersebut, aspek persiapan untuk anak, kebiasaan anak dalam melakukan protokol kesehatan, serta wawasan tentang gejala, penularan, dan pencegahan COVID-19 relatif baik. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara jenjang SD dan SMP. Namun, untuk zona hijau dan non-hijau terdapat perbedaan mengenai aspek kerentanan, di mana siswa di zona non-hijau lebih rentan karena tempat tinggal dan akses menuju sekolah berada di wilayah penyebaran COVID-19.

Faktor Pertimbangan Orang Tua Siswa
Mengizinkan anak belajar kembali di sekolah
(n=11.054 orang tua siswa)



● Non-Hijau ● Hijau

Dukungan yang Dapat Diberikan Orang Tua Siswa
Kepada Sekolah (n=10.557 orang tua siswa)



● Non-Hijau ● Hijau

Dari survei ini juga terungkap, pertimbangan utama orang tua dalam mengizinkan anak belajar tatap muka terutama ialah aspek pencegahan yang terlihat dari aspirasi mereka soal tersedianya sarana kebersihan dan kesehatan, serta penerapan protokol kesehatan di sekolah. Sebagian besar orang tua juga bersedia memberikan dukungan dalam upaya pencegahan COVID-19 di sekolah, terutama dalam penyediaan perlengkapan kesehatan, sarana kebersihan, serta melakukan desinfeksi berkala di sekolah. Pentingnya peran orang tua diperkuat oleh pandangan guru dan kepala sekolah dalam diskusi yang melihat urgensi dari pelibatan orang tua dalam persiapan untuk pembukaan kembali sekolah. Sebagian responden dalam diskusi terpumpun juga mengangkat isu pentingnya pendidikan *parenting* untuk orang tua dalam pendampingan anak karena sebagian siswa masih akan melanjutkan pembelajaran dari rumah.

DISIPLIN DI LUAR SEKOLAH

Selain berbagai aspek di atas, diskusi bersama guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pakar menyepakati bahwa kondisi di luar sekolah juga tak kalah penting untuk diperhatikan. Sebagai lingkup terbatas, sekolah diyakini dapat menerapkan protokol kesehatan. Namun, perilaku warga di luar sekolah belum menunjukkan tertib dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Di banyak daerah, kegiatan belajar dari rumah justru memicu anak-anak banyak bermain di luar rumah. Pengawasan orang tua dan lingkungan sangat terbatas sehingga disiplin dan protokol kesehatan tidak diindahkan. Jika tidak ditangani dengan baik, aspek di luar sekolah ini dikhawatirkan dapat berdampak negatif apabila sekolah dibuka. Oleh karena itu, guru dan kepala sekolah meminta agar pembukaan kembali sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta masyarakat perlu bersama-sama mewujudkan disiplin protokol kesehatan.

Pakar kesehatan, kebencanaan, dan perlindungan anak dalam diskusi juga mengingatkan pentingnya aspek keamanan dan kesejahteraan bagi warga sekolah. Keamanan mengacu pada kesehatan fisik, sedangkan kesejahteraan mengacu pada kesehatan mental dan sosio-emosional. Data dari Satgas Ikatan Psikologi Klinis Indonesia untuk penanganan COVID-19 menunjukkan meningkatnya permasalahan psikologis di kalangan anak dan remaja, dari yang ringan sampai berat seperti stres dan kecenderungan melukai diri sendiri. Hal ini perlu menjadi perhatian dan pertimbangan terkait pembukaan sekolah atau meneruskan kebijakan belajar dari rumah. Pendataan dan pengecekan kondisi kesehatan dan kesejahteraan warga sekolah secara berkala merupakan langkah penting yang perlu dilakukan sebelum dan ketika sekolah dibuka.

REKOMENDASI

Dari survei yang dilakukan, secara umum kesiapan dinas pendidikan, sekolah, guru, dan orang tua dalam pembukaan kembali sekolah sudah relatif baik. Namun, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan.

Pertama, pemerintah daerah yang akan melakukan pembukaan kembali sekolah perlu memastikan kondisi keamanan dan kesehatan di daerahnya, terutama tingkat penyebaran virus, serta disiplin dan penerapan protokol kesehatan. Sekolah yang aman dan sehat tidak hanya bergantung pada kondisi sarana dan penerapan protokol kesehatan di sekolah, tetapi juga kondisi di luar sekolah. Kesehatan mental siswa dan guru juga perlu mendapat perhatian.

Kedua, Dinas Pendidikan perlu membentuk Pos Pendidikan sebagai upaya serius menangani masalah pendidikan di masa pandemi. Pos Pendidikan merupakan bagian dari Gugus Tugas COVID-19 di daerah yang bertugas melakukan koordinasi untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 bagi warga sekolah, melakukan pendataan kondisi kesehatan warga sekolah, akses terhadap listrik dan internet, serta kesiapan dan kebutuhan belajar siswa (SE Sekjen Kemendikbud 15/2020). Dalam membentuk Pos Pendidikan, Dinas Pendidikan dapat memaksimalkan struktur yang sudah ada sebelumnya, seperti Gugus Unit Kesehatan Sekolah di daerah yang dilengkapi dengan unsur lainnya.

Ketiga, Dinas Pendidikan perlu melakukan pendataan dan pengecekan kondisi kesehatan warga sekolah secara berkala. Pendataan kondisi kesehatan meliputi data: (a) orang tanpa gejala; (b) orang dalam pemantauan; (c) pasien dalam pengawasan; dan (d) terkonfirmasi positif. Dinas Pendidikan bersama Dinas Kesehatan juga perlu melakukan tes kesehatan secara rutin, terutama bagi guru dan tenaga kependidikan, untuk menjamin dan memantau kondisi kesehatan sebelum dan selama pembukaan kembali sekolah.

Keempat, menjamin sekolah memiliki sarana kebersihan dan kesehatan yang memadai, meliputi kecukupan air, toilet, sarana cuci tangan pakai sabun, alat pengukur suhu tubuh tembak, dan ruang UKS. Jumlah dan kondisi minimum kelengkapan sarana dan prasarana tersebut telah diatur dalam Permendiknas 24/2007. Perbaikan dan pemeliharaan berbagai sarana dan prasarana tersebut dapat menggunakan dana BOS sebagaimana diatur dalam Permendikbud 8/2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.

Kelima, memastikan sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dinas pendidikan setempat perlu melakukan evaluasi berkala dibantu oleh pengawas sekolah yang secara rutin memantau kondisi sekolah. Dinas Pendidikan juga perlu membuka kotak pengaduan guna menerima masukan dari orang tua dan masyarakat.

Keenam, sekolah perlu melibatkan dukungan orang tua baik dalam persiapan maupun pelaksanaan belajar tatap muka melalui Komite Sekolah dan Paguyuban Orang Tua. Dukungan tidak hanya berkenaan dengan “izin orang tua” dalam penyelenggaraan belajar tatap muka, tetapi terutama peran orang tua dalam menjamin siswa aman selama menuju dan pulang dari sekolah, membekali siswa dengan masker, makan dan minum, serta mendukung sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan dan memenuhi sarana dan prasarana kebersihan yang diperlukan.





Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/
kajian yang dilakukan oleh
Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2020.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827.
website: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id.

Tim Penyusun:

Lukman Solihin
Amaliah Fitriah
Joko Purnama
Ika Hijriani
Imelda Widjaja